



Media Title	Bisnis Indonesia		
Head Line	PU Alokasikan Rp1,5 Triliun		
Date	3 Feb 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	30	Article Size	
Journalist	Dimas Novita	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

PU Alokasikan Rp1,5 Triliun

JAKARTA—Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan Rp1,5 triliun untuk pengadaan lahan pada tahun ini, naik 50% dibandingkan dengan 2013 sebesar Rp1 triliun.

Dirjen Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto mengatakan sebagian besar dana tersebut akan diperuntukkan untuk pembebasan lahan jalan tol, khususnya proyek yang belum memiliki perjanjian perusahaan jalan tol (PPJT).

"Seperti Medan-Kuala Namu atau Medan-Binjai," katanya kepada *Bisnis* baru-baru ini.

Hal itu berdasarkan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang mewajibkan pemerintah menanggung seluruh biaya pengadaan tanah bagi proyek infrastruktur, yang baru dimulai setelah UU tersebut berlaku.

Selain itu, Ditjen Bina Marga juga mengajukan dana *land capping* Rp2,1 triliun, mengingat tahun ini merupakan percepatan pembebasan lahan. Saat ini, ajuan anggaran tersebut masih diproses di Kementerian Keuangan.

"Dari dana awal yang telah diberikan, kami masih punya Rp4,5 triliun. Untuk tahun ini kami ajukan Rp2,1 triliun."

Dana *land capping* adalah dana dukungan yang diberikan pemerintah dari anggaran pengeluaran dan belanja negara kepada badan usaha jalan tol (BUJT) yang sudah menuntaskan kewajiban pendanaan untuk pembebasan lahan sesuai dengan PPJT.

Djoko menyampaikan pencairan anggaran tersebut relatif lama karena membutuhkan proses yang panjang. Namun, akan diusahakan cair pada semester ini, sehingga dapat segera disalur-

kan kepada BUJT.

"Sekarang saja sudah ada beberapa paket yang membutuhkan dana besar seperti Cinere-Jagorawi dan Depok-Antasari," ujarnya.

AJUKAN TAMBAHAN

Dia mengatakan tahun lalu dana *land capping* yang dianggarkan dari APBN hanya Rp500 miliar. Akibat kebutuhan yang semakin meningkat, maka Kementerian PU mengajukan tambahan Rp450 miliar. "*Last minute* kami dapat tambahan itu."

Mengenai ruas jalan tol yang akan mendapatkan alokasi dana *land capping* pada tahun ini, Djoko menuturkan tidak akan jauh berbeda dari komposisi penyaluran dana dukungan berupa biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah karena perubahan harga tanah. Pemerintah menanggung beban pembiayaan lahan jika harga tanah meningkat lebih dari 110% dari harga awal.

Dengan demikian, kenaikan harga tanah sebesar 10% akan ditanggung oleh pemerintah dengan skema *reimbursement* yang ditangani oleh kas BUJT terlebih dahulu.

"Yang besar itu masih Depok-Antasari. Cibitung-Cilincing juga akan mulai. Jadi tahun ini kejar yang lama dan dukung yang baru," paparnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Satuan Kerja Land Capping Nurdin Abdul Fatah mengatakan dana tambahan *land capping* Rp450 miliar di dapat pada 24 Desember 2013.

"Kami tagih ke Kementerian Keuangan pada 27 Desember, kemudian langsung kami salurkan ke BUJT yang sudah kontrak dan berproses [pembayaran] di lapangan," katanya saat dihubungi *Bisnis*, Minggu (2/2). (Dimas Novita S.)